

The Effect of Regional Original Revenue, Tax Effort, and Capital Expenditure on The Level of Financial Independence of Regional Governments f Districts And Cities In South Sumatra In 2019-2023

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tax Effort, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Lisa Septiani^{1*}, Sri Hartaty², Devi Febrianti³

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya^{1,2,3}

lisaseptiani1802@gmail.com¹, srihartaty@polsri.ac.id², devi.febrianti@polsri.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of regional original revenue, tax effort, and capital expenditure on the level of financial independence of local district and city governments in South Sumatra in 2019-2023. The research data used secondary data with a quantitative approach. The data of this study was obtained from the Audit Report (LHP) on the Regional Government Financial Statements (LKPD). The number of samples was 11 districts and cities in South Sumatra Province with a total of 55 LHP LKPD observations for the 2019-2023 period. The analysis technique used was panel data analysis with the help of the Eviews 12 software. The results of this study show that: (1) Regional Original Revenue has an effect on the level of independence, (2) Tax Effort has no effect on the level of independence, (3) Capital Expenditure has no effect on the level of independence (4) Regional Original Revenue, Tax Effort, and Capital Expenditure simultaneously affect the level of independence.

Keywords : Regional Original Revenue, Tax Effort, Capital Expenditure, Independence Level

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, *tax effort*, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Data penelitian menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jumlah sampel sebanyak 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan total pengamatan 55 LHP LKPD periode tahun 2019-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan bantuan sofware Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian, (2) *Tax Effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian, (3) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian (4) Pendapatan Asli Daerah, *Tax Effort*, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, *Tax Effort*, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian

1. Pendahuluan

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah diatur undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus daerah yang sesuai dengan kondisi pemerintah. Tujuan utama otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri agar pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, Andriana (2020).

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada kabupaten dan kota yang mana bertujuan untuk membuat daerah dapat mandiri dalam penyelesaian masalahnya dan dapat berkembang dengan baik dari sisi pembangunan, maupun dapat menciptakan kemandirian ketika suatu daerah dapat mengelola dan mengurus daerahnya dengan baik, Novitasari & Novitasari (2019). Kemandirian daerah dapat menjadi tolak ukur seberapa besar suatu daerah berhasil atau tidak dalam melaksanakan otonomi daerah yang mana menjadi kebijakan dari pemerintah daerah. Daerah yang mandiri apabila pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan yan utama dalam membiayai pengeluaran daerah sehingga tidak bergantung pada pinjaman kepada *stakeholder*, pemerintah provinsi maupun pusat, Sarumaha & Annisa (2023).

Masih banyak pemerintah daerah lingkup Sumatera Selatan yang kriteria kemandirian keuangan daerahnya masuk dalam kategori sangat kurang, secara rata-rata rasio kemandirian keuangan tercatat pada kategori sangat kurang (range 0%-10%), Sumsel (2024). Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan bantuan pemerintah pusat menunjukan bahwa pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri. Dengan kata lain, peranan dalam penerimaan yang berasal dari pemerintahan pusat lebih mendominasi dalam susunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Permasalahan pada umumnya, daerah-daerah di Indonesia saat ini kontribusi pendanaan dari sisi pendapatan asli daerah masih minim dikarenakan perolehan pendapatan asli daerah yang kecil akibat kurang baik dan optimalnya pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah oleh pemerintah daerah, Setiawan (2024). Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar pendapatan asli daerah, jika rasio kemandirian semakin tinggi, maka tinggi pula partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari pendapatan asli daerah. Dikutip dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan (Kanwil DJPb) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) diskusi ini menyoroti tantangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, termasuk optimalisasi sistem pemungutan, dan kepatuhan wajib pajak, yang diharapkan Sumatera Selatan dapat memperkuat kemandirian fiskalnya serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan *tax effort* ini diharapkan berlanjut dan harapannya semakin besar realisasi pajak terhadap kemampuan bayar pajak yang dilihat dari potensi daerah, dan semua sektor pajak perlu digali lebih optimal agar daerah dapat semakin besar mendorong untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerahnya. Kedepannya, pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan perlu mendorong peran sektor penerimaan dari sisi pajak daerah. Dengan *tax effort* yang meningkat, harapannya kemandirian keuangan daerah dapat meningkat akibat dari perolehan penerimaan asli daerah yang bersumber dari pajak dimana kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah.

Disisi lain belanja modal yang digunakan pemerintah untuk menambah aset tetap yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun periode akuntansi, selain digunakan untuk kepentingan dan keperluan publik, belanja modal digunakan pemerintah daerah sebagai investasi jangka panjang. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk memperoleh aset dengan masa manfaat lebih dari satu periode, Rivandi & Anggraini (2022). Belanja modal diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang di dalamnya adalah termasuk belanja infrastruktur diharapkan mampu menciptakan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya pendapatan asli daerah dapat meningkat baik berupa pajak maupun retribusi daerah, Andriana (2020).

Adapun Researc gap penelitian ini menunjukan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, Kusmila (2023) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan menurut, Oktavia & Handayani (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikutnya penelitian ini sejalan dengan, Riza & Zuripal (2023) menyatakan bahwa *tax effort* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah. Sedangkan, Oktavia & Handayani (2021) menyatakan bahwa *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan Sulistyawati (2024) menyatakan belanja modal mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, Saraswati & Nurharjanti (2021) menyebutkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Tax Effort*, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan Tahun 2019-2023”.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship

Donaldson dan Davis (1991) mengemukakan Teori *Stewardship* mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Stewards* selaku pemerintah dan *principals* selaku rakyat menunjukkan sebuah hubungan yang tercipta karena manusia memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur pada pihak lain. Implikasi penelitian ini terkait dengan teori *stewardship* adalah bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab dan tujuan utama untuk mengelola sumber daya daerah (pendapatan daerah) secara bertanggung jawab dan demi kepentingan masyarakat daerah. *Principals* sebagai masyarakat daerah memberikan kepercayaan kepada *steward* yaitu pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan. Dimana apabila pemerintah daerah selaku *steward* berhasil memenuhi kebutuhan daerah maka akan dapat memuaskan masyarakat daerah selaku *principals* sehingga ketika kebutuhan bisa tercukupi maka kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam otonomi daerah kemandirian keuangan dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah mampu membangun daerahnnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Maksud dari kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan suatu daerah untuk mengenali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga tidak terlalu mengandalkan atau bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, Malau & Simarmata (2020). Dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber yang ada di dalam daerahnnya sendiri yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Citra & Kurnia (2024). Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang sangat berpengaruh karena berupa pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah sehingga sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam

menentukan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pengeluaran daerah. Menurut ketentuan undang-undang nomor 33 tahun 2004 dan berlaku secara umum.

Tax Effort

Tax effort salah satu upaya bagaimana daerah mampu mengoptimalkan dalam pemungutan penerimaan pajak daerahnya. Upaya pajak atau *tax effort* merupakan rasio antara penerimaan pajak daerah dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Semakin tinggi kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak daerahnya maka semakin tinggi pula pendapatan daerahnya sehingga dapat terlaksanakan pada daerah tersebut yaitu kemandirian daerah. Jika besaran nilai *tax effort* lebih besar dari 1 (satu) dapat diartikan bahwa daerah memiliki upaya pajak (*tax effort*) yang tinggi, sedangkan jika nilai *tax effort* kurang dari 1(satu) mengartikan bahwa daerah tersebut memiliki upaya pajak (*tax effort*) yang rendah, Aida *et al.*,(2023).

Belanja Modal

Belanja Modal dikelompokkan menjadi belanja langsung, biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LRAPBD) pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi penelitian ini Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan periode 2019-2023 di analisis menggunakan EViews 12 dengan analisis Regresi Data Panel. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini, *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2019).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19.458411	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	96.167278	10	0.0000

Sumber: Data diolah,2025

Gambar 1. Uji Chow

Berdasarkan gambar 1 hasil uji chow dari $P-Value < 0,05$. Dengan demikian H_1 diterima yang artinya model yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model* dari pada *Common Effect Model*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.885489	3	0.0196

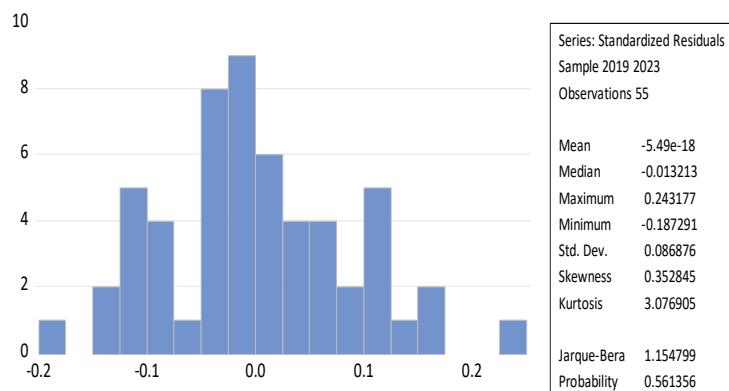
Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2 Uji Hausman

Berdasarkan Gambar 2 Hasil uji hausman dari nilai *Cross-seccction Chi-square* yaitu sebesar 9,885489 dengan *P-Value* < 0,05, maka H_1 diterima yang artinya model yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model*. setelah dilakukan uji pemilihan model dari Uji Chow, Uji Hausman di dapat *Fixed Effect Model* terpilih dua kali, ditarik keputusan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model regresi panel paling tepat untuk dipakai dalam penelitian ini.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.



Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 3. Uji Normalitas

Hasil Gambar 3 dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari *P-Value* > 0,05, maka H_0 diterima yang berarti residual berdistribusi normal.

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.913639	1.438887	0.634962	0.5290
X1	-0.033998	0.054987	-0.618293	0.5398
X2	-0.137422	0.362458	-0.379140	0.7065
X3	0.001869	0.017377	0.107568	0.9149

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 4 Uji heteroskedastisitas

e. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi antara variabel independen.

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.074281	0.550405
X2	0.074281	1.000000	-0.050890
X3	0.550405	-0.050890	1.000000

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 5. Uji multikolinearitas

Berdasarkan gambar 5 model regresi dalam penelitian tidak mengalami permasalahan multikolinearitas dimana variabel hal ini dapat dilihat dari nilai *correlation* x1, x2 dan x3 < 0,85.

f. Regresi Data Panel

Regresi data panel digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, *Tax Effort*, dan Belanja Modal terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil uji regresi data panel dengan Eviews 12 menggunakan *Fixed Effect Model*.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.36314	2.679392	-5.360598	0.0000
X1	0.654177	0.102392	6.388928	0.0000
X2	0.911168	0.674944	1.349992	0.1844
X3	-0.014085	0.032358	-0.435286	0.6656

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.882891	Mean dependent var	2.254277
Adjusted R-squared	0.845759	S.D. dependent var	0.253868
S.E. of regression	0.099703	Akaike info criterion	-1.557918
Sum squared resid	0.407566	Schwarz criterion	-1.046961
Log likelihood	56.84275	Hannan-Quinn criter.	-1.360327
F-statistic	23.77709	Durbin-Watson stat	2.525846
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 6. Regresi Data Panel

Berdasarkan gambar 6 tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y juga terdapat tidak ada pengaruh variabel x terhadap variabel y. Sehingga besarnya pengaruh yang diberikan oleh pendapatan asli daerah, *tax effort*, dan belanja modal adalah sebesar 88,28%. Sisanya sebesar 11,72% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi data panel disimpulkan bahwa adanya hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada hasil uji t dengan probabilitas signifikansi pendapatan asli daerah sebesar 0,000 ($0,00 < 0,05$), maka pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pendapatan yang baik mencerminkan peran aktif pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik yang bertanggung jawab. Kemandirian keuangan daerah

merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diharapkan memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, PAD menjadi instrumen utama yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan lokal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya Oktavia & Handayani (2021) dan Bella, (2022) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian ini bertolak dengan Kusmila (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi data panel disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara *tax effort* terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,184 ($0,18 > 0,05$). Dengan demikian *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tangkat kemandirian keuangan daerah.

Ketidaksignifikanan pengaruh *tax effort* terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa upaya penggalian pajak saja belum cukup jika tidak bersamaan dengan pengelolaan yang efisien dan terarah oleh pemerintah daerah. Daerah yang memiliki tingkat *tax effort* tinggi berarti telah menggunakan instrumen fiskal secara efisien untuk memaksimalkan penerimaan daerahnnya. Kemandirian fiskal yang merupakan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah semestinya meningkat jika *tax effort* meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktavia & Handayani (2021) menyatakan bahwa *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya penelitian ini bertolak dengan Riza & Zuripal (2023) menyatakan bahwa *tax effort* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi data panel disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Probabilitas signifikansi belanja modal 0,665 ($0,66 > 0,05$), maka belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal merupakan komponen penting dalam struktur pengeluaran daerah yang diarahkan untuk pembangunan aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, dan fasilitas publik lainnya. Belanja modal berperan sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas basis penerimaan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan indikator utama dari tingkat kemandirian fiskal. Ketidaksignifikanan ini dapat beberapa kemungkinan belanja modal yang dialokasikan belum diarahkan secara optimal ke sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Saraswati & Nurharjanti (2021) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya penelitian ini bertolak dengan Sulistyawati *et al.*, (2024) menyatakan belanja modal mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Tax Effort* dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi data panel disimpulkan bahwa adanya hubungan antara pendapatan asli daerah, *tax effort* dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan probabilitas tingkat signifikansi secara simultan 0,000 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, *tax effort* dan belanja modal berpengaruh

dan signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah, *tax effort* dan belanja modal dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri dengan demikian, semakin baik kinerja ketiga variabel tersebut secara bersama-sama, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, yang ditandai dengan berkurangnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan tingginya pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. *Tax effort* secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
4. Pendapatan asli daerah, *tax effort* dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Saran

1. Dari penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan dapat terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah agar mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat dengan cara meningkatkan potensi daerah dan diefisiensikannya pemungutannya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode/tahun pengamatan. Sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran kondisi yang sesungguhnya/tergeneralisasi.

Daftar Pustaka

- Aida, A., Dini Hariyanti, & Sumiyarti. (2023). Analisis Tax Effort Daerah Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(2), 33–52.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113.
- Citra, Y., & Kurnia, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*
- Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Selatan (2025, 2 April). Diseminasi Kajian Fiskal Regional Sumsel, Optimalisasi Pajak Daerah untuk Kemandirian Sumsel. <https://dipb.kemenku.go.id/kanwil/sumsel/id/berita-terbaru/3077-diseminasi-kajian-fiskal-regional-sumsel,-optimalisasi-pajakdaerah-untuk-kemandirian-sumsel.html>.
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337.
- Misra Sarumaha, & Annisa Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111.

- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174.
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 10(2), 2460–0585.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera*. 20(1), 105–123.
- Riza, R., & Zuripal. (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1961–1973.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Setiawan, C. (2024). Pengaruh Tax Effort , Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2021.
- Sulistyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akutansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta Bandung.
- Sumsel, K. D. (2024). *Lkpk & Iskp*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.